

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
Daftar Tabel.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	4
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Rencana Pendapatan Daerah.....	7
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah	11
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	12
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	31
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	31
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan	36
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga.....	37
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	39
BAB VI PENUTUP.....	41

Daftar Tabel

Tabel	2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	8
Tabel	3.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	13
Tabel	4.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	31
Tabel	4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019	36
Tabel	5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai tindak lanjut kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2019. Dokumen PPAS tersebut berisi program prioritas dan anggaran yang diberikan kepada setiap perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Dasar penyusunan PPAS Tahun 2019 adalah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Selain itu, penyusunan PPAS Tahun 2019 juga berpedoman kepada Permendagri 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mekanisme penyusunan rancangan PPAS dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya penentuan skala prioritas pembangunan daerah; penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Secara substansi PPAS memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah.

Prioritas belanja daerah Kabupaten Lebak yang menjadi substansi PPAS disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran yang mengacu pada Arahan prioritas pembangunan Tahun 2019 yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah.
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

3. Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 disusun dengan Tujuan :

1. Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Kegiatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
3. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lebak Tahun 2019 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah;
21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang oleh daerah melalui kas daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Oleh karenanya, fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan objek pendapatan tersebut.

Penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada prioritas plafon anggaran sementara tahun 2019, penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan realisasi penerimaan daerah tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi tahun yang akan datang.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2019 disusun dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan potensi dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Secara umum pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2,012,397,874,851 menurun 16,64%, atau sebesar Rp. 401,635,662,249.43

dari Tahun Anggaran 2018 yang mencapai Rp.2,414,033,537,100.00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 8,750,637,501 atau 3% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 299,732,587,100 menjadi sebesar Rp. 8,750,637,501.
2. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 pendapatannya mengalami penurunan sebesar 28%, dari Tahun 2018 sebesar Rp.1,575,814,690,000.00 menjadi Rp. 1,140,613,726,065 pada Tahun 2019. Penurunan tersebut diakibatkan belum dimasukkannya Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 538,486,260,000 menjadi Rp. 563,300,924,185 pada Tahun 2019. Peningkatan tersebut akibat adanya meningkatnya pendapatan hibah dari FMSRB.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka rencana target pendapatan Daerah pada Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN 2019	DASAR HUKUM
1	2	3	4
1.1	Pendapatan Asli Daerah	308,483,224,601	
1.1.1	Pajak Daerah	73,900,425,000	Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.1.2	Retribusi Daerah	12,811,651,601	Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.1.3	Hasil Penggunaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Atas penyertaan Modal pd Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,000,000,000	Perda Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218,771,148,000	PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.2	Dana Perimbangan	1,140,613,726,065	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	53,952,435,065	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,086,661,291,000	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	0	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	563,300,924,185	
1.3.1	Pendapatan Hibah	191,768,870,000	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	107,406,640,185	
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	264,125,414,000	
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,012,397,874,851	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	
3.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0	
3.1.2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	

Rencana Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2019 secara keseluruhan mencapai 3% dibandingkan PAD pada APBD Tahun 2018. Ini diperoleh melalui penyesuaian target penerimaan PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Secara keseluruhan Pajak Daerah diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 15% pada Tahun 2019, dari semula sebesar Rp. 64,408,200,000 pada Tahun 2018 menjadi Rp. 73,900,425,000 atau bertambah sebesar Rp. 9,492,225,000.

Estimasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2019 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 2% dari semula sebesar Rp. 12,574,387,100 pada APBD Tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 12,811,651,601 atau meningkat sebesar Rp. 237,264,501 .

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak mengalami perubahan dari tahun 2018 sekarang sama pada tahun 2019 sebesar Rp.3.000.000.000.

Lain-lain PAD yang Sah diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp.978,852,000 atau 0,45% dari tahun 2018 sebesar Rp. 219,750,000,000 pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 218,771,148,000.

Kelompok Dana Perimbangan Tahun 2019 diperkirakan mengalami penurunan sebesar 28% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 1,575,814,690,000 menjadi Rp. 1,140,613,726,065 pada Tahun 2019. Menurunnya proyeksi pendapatan pada dana perimbangan ini dipengaruhi oleh belum dicantumkannya Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 21% dibanding dengan Tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena nilai proyeksi berdasarkan rata-rata realisasi bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun 2015-2017. Sementara untuk pendapatan dari dana alokasi khusus dilakukan setelah ada informasi resmi dari kementerian keuangan setelah RUU tentang APBN Tahun 2019 disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI.

Rencana pendapatan dari Dana Alokasi Umum pada Tahun 2019 pendapatannya tidak mengalami perubahan dari Tahun 2018 sebesar Rp. 1,086,661,291,000.00.

Untuk sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 5% dari Tahun 2018 sebesar Rp. 538,486,260,000.00 menjadi Rp. 563,300,924,185 pada Tahun 2019.

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Untuk APBD Tahun anggaran 2019 penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari pencairan dana cadangan sebesar dan Silpa. Namun demikian pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran ini, nilai dana cadangan tidak teranggarkan dan nilai Silpa secara definitif belum dicantumkan, karena besaran Silpa yang dimuat dalam APBD 2019 akan didasari atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK-RI.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah Tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada prioritas pembangunan dan pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Untuk mewujudkan Prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2019 dituangkan ke dalam Belanja daerah yang akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan Unsur penunjang pemerintahan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan serta pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pada urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; serta sosial. Sedangkan Belanja urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Urusan pilihan diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan melalui sektor-sektor pendukung perekonomian masyarakat. Alokasi Belanja Daerah tersebut di atas penggunaannya diarahkan terutama untuk program-program yang dapat mendukung pencapaian target Visi dan Misi Daerah. Urusan pilihan terdiri atas urusan kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

Selain pengelompokan belanja berdasarkan urusan, belanja daerah terdiri juga dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan, belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan tidak dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun komponen belanja yang termasuk kedalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai (Gaji), bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai perwujudan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2019 yang akan datang, maka dokumen PPAS ini akan menguraikan secara lengkap berbagai sasaran dari setiap Prioritas dan SKPD pelaksana program/kegiatan sebagai mana matrik prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4
1. Peningkatan kualitas Infrastruktur Wilayah	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan sedang.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase penanganan jalan dan jembatan akibat bencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang tersedia	Dinas Perhubungan
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan rambu keselamatan lalulintas	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR	Dinas Perhubungan
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase ketersediaan Fasum di kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Panjang Jalan Perdesaan yang terbangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen Rencana Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang dibanding RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam	Dokumen Perencanaan Teknis PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
			Permukiman dan Pertanahan; dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase terpenuhinya layanan jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase akses sanitasi (air limbah)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase akses air minum	
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase perumahan dengan PSU Baik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pengembangan Perumahan	Proporsi rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase perbaikan rumah akibat bencana	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Menurunnya persentase kawasan kumuh perkotaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi dan Nasional	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pengcab berprestasi	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan parasarana dalam kondisi baik	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan jaminan dan perlindungan.	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan Formal/Non-Formal	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial memiliki usaha	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.	Jumlah KAT, Fakir miskin dan PMKS melakukan usaha ekonomi	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase penanganan areal pemakaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (AMH)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	
	Program BOS	Angka Putus sekolah SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus sekolah SMP	
		Angka Melanjutkan SD ke SMP	
		Angka melanjutkan SMP ke SMA	
	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Kelulusan SD	
		Angka Kelulusan SMP	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Minat baca masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata persentase capaian SPM Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Forum Anak yang aktif	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Kecamatan Ramah Anak	
		Jumlah PATBM	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	Dinas Kesehatan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Upaya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
		Angka kematian Bayi	
		Prevalensi Balita Gizi buruk	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Desa ODF	Dinas Kesehatan

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan
	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Cakupan angka kontak	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	RSUD Dr. Adjidarmo
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit dalam kondisi baik	RSUD Dr. Adjidarmo
	Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD	RSUD Dr. Adjidarmo
	Program Bantuan Operasional Kesehatan	Indek Kerpuasan Masyarakat terhadap layanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
	Program Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
			Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Ratio penyuluh KB 1 PLKB untuk 2 desa	
	Program Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja	Cakupan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need)	
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase jumlah anggota keluarga Poktan BKB, BKR, BKL yang aktif menjadi peserta KB	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3.Pembangunan dan pengembangan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan			

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
ekonomi daerah			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah dan Jenis Obyek Wisata	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pelestarian adat budaya daerah	Dinas Pariwisata
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terlestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Padi	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Jumlah Produksi Palawija	
		Jumlah Produksi Hortikultura	

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
		Jumlah Produksi Perkebunan	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penanganan Penyakit Hewan	Dinas Peternakan
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Dinas Peternakan
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian	Persentase produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian	Jumlah peningkatan Kelas kelompok	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Produksi Ikan Budidaya	Dinas Perikanan
		Produksi Ikan Tangkap	
	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan	Persentase Produksi Perikanan yang Dikelola	Dinas Perikanan
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Efisien Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase Sarana Perdagangan yang Representative	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Industri kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase UMK yang Aktif dan Kompetitif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Wirausaha Muda Baru yang memperoleh akses permodalan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan dan berhasil	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah			
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase penyebarluasan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informatika untuk layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi urusan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Terfasilitasinya Konflik sengketa tanah	Dinas Perumahan, Kawasan

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
			Permukiman dan Pertanahan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil	
		Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase penegakan perda	Kantor Kesbangpol Linmas; dan Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tepat waktu.	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi antar kelompok masyarakat.	Sekretariat Daerah; dan Kantor Kesbang Linmas
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan koordinasi FKUB.	Sekretariat Daerah dan Kantor Kesbang Linmas;
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Cakupan penanganan kasus penyakit masyarakat (Pekat)	Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesbang Linmas
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase BUMDES yang mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Prosentase Kelompok TP. PKK yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan pengelolaan keuangan desa dengan kategori baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah dalam kondisi baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan dalam kondisi baik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Aparatur Pengelola Dokumen/Arsip yang memenuhi standar kompetensi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga lain	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Opini BPK	Inspektorat Daerah

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Jumlah aset yang sesuai dengan total seluruh aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten lebak	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Sekretariat Daerah
		Persentase realisasi pendapatan dan belanja	
		Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penyediaan aset tanah milik Pemda	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Level APiP	Inspektorat Daerah
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat Daerah

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat paripurna	Sekretariat DPRD
		Persentase terpenuhinya kebutuhan jaring asmara	
		Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Terpenuhinya layanan kedinasan KDH/WKDH	Sekretariat Daerah
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penetapan peraturan daerah	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah persiapan penataan daerah otonomi baru	Sekretariat Daerah
	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	Jumlah jenis administrasi daerah yang berjalan dengan baik.	Sekretariat Daerah
	Program Peningkatan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan Barang dan jasa	Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Seluruh Kecamatan
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan sinergisitas Program pembangunan Pusat dan Daerah baik jangka pendek maupun jangka menengah	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas PUPR; Dinas Perkim & Pertanahan; Dinas Sosial; DPPKBP3A; Dinkop & UKM; Disnakertrans; Disperindag
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Seluruh Perangkat Daerah

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Seluruh Perangkat Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memakai pakaian dinas sesuai ketentuan	Seluruh Perangkat Daerah
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Lahan Kritis yang direhabilitasi	
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	informasi lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cemaran Ringan	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	
		Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengangkutan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengurangan Sampah Perkotaan	
		Pengoperasian TPA	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik terhadap luas wilayah perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Banjir	Pengurangan dampak bencana banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas	Program	Sasaran	Perangkat Daerah
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan penanggulangan korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penyusunan Plafon Anggaran Sementara dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengacu pada Permendagri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dokumen PPAS hanya membahas pagu anggaran yang bersifat sementara, sedangkan alokasi definitifnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pagu anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Table 4.1
Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
	<i>URUSAN PEMERINTAHAN</i>	822,390,445,600.00
A.	URUSAN WAJIB	671,738,700,900.00
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	607,222,484,350.00
1.01	PENDIDIKAN	193,922,180,000.00
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	193,922,180,000.00
1.02	KESEHATAN	224,117,595,950.00
1.02.01	DINAS KESEHATAN	79,067,595,950.00
1.02.02	RSUD Dr. ADJIDARMO	145,050,000,000.00

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172,193,020,400.00
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	172,193,020,400.00
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,017,633,000.00
1.04.01	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10,017,633,000.00
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,807,030,000.00
1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3,807,030,000.00
1.06	SOSIAL	3,165,025,000.00
1.06.01	DINAS SOSIAL	3,165,025,000.00
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	64,516,216,550.00
2.01	TENAGA KERJA	3,307,300,000.00
2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,307,300,000.00
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
2.03	PANGAN	3,295,624,000.00
2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	3,295,624,000.00
2.04	PERTANAHAN	-
2.05	LINGKUNGAN HIDUP	8,583,635,000.00
2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8,583,635,000.00
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,124,295,100.00

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,124,295,100.00
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4,219,689,000.00
2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,219,689,000.00
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3,637,995,500.00
2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,637,995,500.00
2.09	PERHUBUNGAN	13,224,439,750.00
2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	13,224,439,750.00
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,541,636,000.00
2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,541,636,000.00
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,707,780,000.00
2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,707,780,000.00
2.12	PENANAMAN MODAL	3,446,391,600.00
2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,446,391,600.00
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,500,014,000.00
2.13.01	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10,500,014,000.00
2.14	STATISTIK	-
2.15	PERSANDIAN	-

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
2.16	KEBUDAYAAN	-
2.17	PERPUSTAKAAN	-
2.18	KEARSIPAN	2,927,416,600.00
2.18.01	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,927,416,600.00
3	URUSAN PILIHAN	38,352,789,000.00
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,005,286,000.00
3.01.01	DINAS PERIKANAN	2,005,286,000.00
3.02	PARIWISATA	5,801,732,000.00
3.02.01	DINAS PARIWISATA	5,801,732,000.00
3.03	PERTANIAN	22,481,917,000.00
3.03.01	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	17,594,464,000.00
3.03.02	DINAS PETERNAKAN	4,887,453,000.00
3.04	PERDAGANGAN	8,063,854,000.00
3.04.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8,063,854,000.00
3.05	KEHUTANAN	-
3.06	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-
3.07	PERINDUSTRIAN	-
3.08	TRANSMIGRASI	-
4	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN	112,298,955,700.00
4.01	PERENCANAAN	6,527,487,000.00

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
4.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6,527,487,000.00
4.02	KEUANGAN	14,799,064,300.00
4.02.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,872,873,000.00
4.02.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5,926,191,300.00
4.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,430,057,700.00
4.03.01	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,430,057,700.00
4.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-
4.05	PENGAWASAN	5,932,359,000.00
4.05.01	INSPEKTORAT DAERAH	5,932,359,000.00
4.06	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	52,097,098,300.00
4.06.01	SEKRETARIAT DAERAH	26,168,607,500.00
4.06.02	SEKRETARIAT DPRD	25,928,490,800.00
4.07	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA	24,512,889,400.00
4.07.01	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	1,855,478,000.00
4.07.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,625,196,000.00
4.07.03	KECAMATAN RANGKASBITUNG	2,125,018,000.00
4.07.04	KECAMATAN KALANGANYAR	568,047,000.00
4.07.05	KECAMATAN CIBADAK	658,102,250.00
4.07.06	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	567,641,000.00
4.07.07	KECAMATAN CIMARGA	669,735,800.00
4.07.08	KECAMATAN CIKULUR	597,914,250.00
4.07.09	KECAMATAN LEUWIDAMAR	577,412,000.00
4.07.10	KECAMATAN SAJIRA	607,628,700.00
4.07.11	KECAMATAN MAJA	633,220,750.00

NO	URUSAN / SKPD	PPAS 2019
4.07.12	KECAMATAN CURUGBITUNG	613,282,000.00
4.07.13	KECAMATAN MUNCANG	617,477,000.00
4.07.14	KECAMATAN SOBANG	611,744,500.00
4.07.15	KECAMATAN BOJONGMANIK	572,300,000.00
4.07.16	KECAMATAN CIRINTEN	588,037,500.00
4.07.17	KECAMATAN CIPANAS	656,372,950.00
4.07.18	KECAMATAN LEBAKGEDONG	547,915,000.00
4.07.19	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	631,225,500.00
4.07.20	KECAMATAN CILELES	662,259,250.00
4.07.21	KECAMATAN BANJARSARI	672,168,000.00
4.07.22	KECAMATAN CIJAKU	609,478,200.00
4.07.23	KECAMATAN CIGEMBLONG	644,646,000.00
4.07.24	KECAMATAN MALINGPING	637,977,500.00
4.07.25	KECAMATAN WANASALAM	648,472,000.00
4.07.26	KECAMATAN PANGGARANGAN	613,250,500.00
4.07.27	KECAMATAN CIHARA	659,506,000.00
4.07.28	KECAMATAN BAYAH	673,866,000.00
4.07.29	KECAMATAN CIBEBER	687,584,000.00
4.07.30	KECAMATAN CILOGRANG	679,933,750.00
JUMLAH		822,390,445,600.00

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk setiap SKPD dikelompokkan berdasarkan urusan yang didalamnya memuat program-program untuk kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019. Satu program dimungkinkan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah secara terpadu dan berkesinambungan serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara adalah program-program yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019. Plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan tersaji secara

lengkap dalam lampiran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	Belanja Pegawai	768,394,509,000.00
2	Belanja Hibah	20,939,853,000.00
3	Belanja Bantuan Sosial	3,847,800,000.00
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	8,671,165,160.10
5	Belanja Bantuan Keuangan	353,717,354,590.47
6	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00
	Total Belanja Tidak Langsung	1,160,570,681,750.57

Alokasi belanja pegawai Tahun 2019 di utamakan untuk membayar gaji PNS termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi, uang duka wafat, uang jasa pengabdian, biaya pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, belanja penerimaan lainnya KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan iuran BPJS dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi Belanja hibah pada Rencana Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 20,939,853,000.00. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan biaya bagi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Lebak; Pembangunan/Rehab Sarpras Madrasah Diniyah; Sarana Prasarana Keagamaan; KONI; KNPI; KTP; MUI; LPTQ; Pramuka Kwarcab Lebak; Badan Narkotika Kabupaten Lebak; Komisi Penanggulangan AIDS Daerah; Bantuan Sekolah Swasta; Forum Mahasiswa Kedokteran; Forum Mahasiswa MIPA; Dekopinda; Dekranasda; P2TP2A; Dewan Pendidikan; PAMSIMAS; Padat Karya; SANIMAS; Air Bersih Perdesaan; Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP); Baznas; BWI; Dewan Kesenian; LVRI, Yayasan Bulan; Bantuan Operasional PAUD dan LPPL Radio Multatuli.

Alokasi belanja bantuan sosial pada rencana Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 3,847,800,000.00. Obyek–obyek bantuan sosial tersebut dianggarkan diantaranya untuk bantuan Bantuan Sosial bagi masyarakat cacat, Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan-Swadaya/Peningkatan Kualitas Perumahan; serta Bansos yang tidak direncanakan.

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada rencana Tahun 2019 sebesar Rp. 8,671,165,160.10. Pada Tahun 2019, Pemerintah Daerah juga menganggarkan belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp. 5,000,000,000.00.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 beserta perubahannya, apabila APBD diperkirakan surplus, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

- a. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal (investasi) daerah dan;
- c. Transfer ke rekening dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan sebagai konsekuensi kebutuhan bagi pengeluaran pembiayaan yang mendesak dan dianggap perlu oleh daerah. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

- a. Pencairan dana cadangan
- b. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan;
- d. Pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah tersebut dimaksudkan sebagai alokasi anggaran yang dilakukan untuk menguatkan struktur pendapatan daerah.

Tabel 5.1

Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	<u>(20,000,000,000.00)</u>
I	Penerimaan Pembiayaan	0.00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
1.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	0.00
1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
II	Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000.00
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	20,000,000,000.00
	Pembiayaan Netto	<u>(20,000,000,000.00)</u>

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun 2019 merupakan dokumen operasional dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati secara bersama-sama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kabupaten Lebak. Dokumen PPAS Tahun 2019 akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA – SKPD yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan disepakati ini dimungkinkan untuk mengalami perubahan sebagai dampak adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Banten. Perubahan tersebut akan diakomodir dalam proses pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Rangkasbitung, 15 Agustus 2018



BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA